

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang dapat diambil dan dijadikan sebagai literatur. Adapun uraian penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Penelitian Mufidah (2021) mahasiswi Universitas Yudharta Pasuruan dengan judul “Efektivitas Bantuan Sosial Tunai Di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan”, Maksud penelitian ini sebagai ukuran keefektivitasan bantuan sosial tunai di masa pandemi Covid-19 agar menjadi bahan evaluasi untuk dapat mengcover bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. titik permasalahan dalam program BST di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ialah Masih dirasa kurang efektif dalam hal kurangnya keakuratan data dan tidak tepat sasaran sebab tidak ada pembaharuan data dan tidak ada bimbingan teknis terkait pendataan. Selain itu juga terdapat warga yang mendapatkan bantuan ganda, penerima sudah pindah/meninggal sehingga warga lain yang benar benar membutuhkan tidak tercover. Kemudian, Pembagian bantuan melalui bank himbara juga tidak efektif, karena masih ada yang tidak tepat sasaran. Maka perlu suatu adanya keefektivitasan

pelaksanaan bantuan dalam suatu program yang mana bisa dinilai dengan seberapa jauh peningkatan kesejahteraan dan semakin sedikitnya protes dari masyarakat dengan diberlakukan program bantuan tersebut. Adapun persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang bantuan sosial dan mengukur keefektivitasan. Adapun perbedaannya yakni tentang bagaimana efektivitas program bantuan sosial PKH dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi islam, karena dalam penelitian ini tidak menjelaskan secara keseluruhan bantuan sosial tunai (BST) apakah yang dimaksud.

2. Penelitian Diana (2018) yang merupakan mahasiswa program studi ekonomi syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Analisis efektivitas program keluarga harapan (PKH) terhadap pengurangan kemiskinan dalam perspektif ekonomi islam (studi pada desa kota jawa kecamatan way khilau), hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program keluarga harapan dalam mengentaskan kemiskinan di kota jawa masih dalam kategori tidak baik.. maksud dari kategori tidak baik adalah masih kurang tepat sasaran. Jika dilihat dari nilai-nilai ekonomi islamnya yakni tanggung jawab, keadilan dan takaful, pada kenyataannya PKH hanya terlihat dari tanggung jawabnya sedangkan nilai keadilan dan takaful belum efektif. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang efektivitas bantuan sosial PKH dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, adapun perbedaannya yakni pada

target penelitiannya yaitu nilai efektivitas PKH dalam pengurangan kemiskinan, sedangkan penulis memfokuskan pada kesejahteraan masyarakat. Perbedaan lain yakni terletak pada lokasi penelitian dimana penulis berada di Desa Lalowatu Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2020) mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Medan) yang berjudul “Analisis efektivitas program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam pengentasan kemiskinan di desa selotong ditinjau dari perspektif ekonomi islam, hasil dalam penelitian ini menunjukkan ketidakefektivan yang di karenakan program bantuan PKH dan BPNT masih ditemukan kurang tepatnya sasaran penerima bantuan tersebut, hasil penelitian yang diperoleh antara realisasi penerima PKH dan BPNT adalah masih banyaknya masyarakat miskin atau target penerima PKH dan BPNT daripada masyarakat miskin yang sudah menerima atau realisasi penerima PKH dan BPNT. Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang efektifitas PKH, kesejahteraan dan menggunakan perspektif ekonomi islam serta menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Adapun yang menjadi perbedaan, pada penelitian ini mengangkat dua objek penelitian yakni PKH dan BPNT sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada program bantuan sosial PKH.

4. Penelitian yang dilakukan Rahmah Muin (2020) yang berjudul “Efektivitas program keluarga harapan (PKH) terhadap penerima bantuan di desa laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali mandar”, merupakan mahasiswi dari program studi hukum ekonomi syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar. Berdasarkan hasil penelitian ini, menerangkan bahwa belum bisa sepenuhnya dikatakan efektif dalam hal penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun yang menjadi kesamaan dalam penelitian ini yakni sama sama membahas tentang keefektivitasan Program keluarga harapan (PKH), kesamaan lainnya yakni metode penelitian yang dilakukan yakni menggunakan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk meringkas, menggambarkan berbagai kondisi. Yang menjadi perbedaan adalah dari lokasi penelitian dimana peneliti melakukan penelitian di Desa Lalowatu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dan peneliti sebelumnya tidak menggunakan perspektif ekonomi islam.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Sandi (2018) yang berjudul “Analisis efektivitas program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam (studi kasus pada Desa Karya Makmur, Kec. Labuan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur)”, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa semua indikator berjalan

dengan efektif kecuali pada indikator keluaran dan manfaat yang belum berjalan efektif sepenuhnya yakni bantuan sosial PKH kurang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena kecilnya peningkatan atau perubahan kesejahteraan sebelum dan sesudah adanya program keluarga harapan (PKH), hasil penelitian ini juga mengatakan bahwa PKH dapat memenuhi kebutuhan Ad-Dharuriyat, Al-Hijayati, dan Tahsiniyat yang dimana semua kebutuhan selain terpenuhi juga ada peningkatan. Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan perspektif ekonomi islam, membahas mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan dan termasuk penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini memfokuskan pada menganalisis keefektivan PKH, Perbedaan lainnya yakni pada lokasi penelitian.

6. Penelitian yang dilakukan Riyanti (2019) merupakan mahasiswa dari jurusan ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, dengan judul penelitian yakni “Implementasi dan efektivitas program keluarga harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di tinjau dari perspektif ekonomi islam (studi kasus pada peserta PKH Kecamatan Pekalongan Barat)”. Yang menjadi hasil penelitian ini adalah implementasi PKH berupa penyaluran bantuan non tunai dan sembako, serta adanya program family development session (FDS). Diukur dengan 5 indikator yaitu masukan, proses, keluaran, manfaat dan dampak. Jika dilihat dari nilai-nilai ekonomi islam yaitu tanggung jawab, keadilan dan *takaful*. dalam implementasinya

PKH di kecamatan pekalongan barat sudah memiliki nilai tanggung jawab dan keadilan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat terlaksana secara efektif. Kesamaan dalam penelitian ini adalah dari segi judul permasalahan penelitian yang juga membahas tentang program bantuan sosial PKH dan juga menggunakan perspektif ekonomi islam serta menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya yakni terletak pada fokus penelitian yakni lebih ke Implementasi, perbedaan lain yakni pada lokasi penelitian.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Mareta (2022) merupakan mahasiswi program studi ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan mengangkat judul tentang “Efektivitas kebijakan program keluarga harapan (PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan dalam perspektif ekonomi islam (studi kelurahan ketapang kuala kecamatan panjang kota Bandar lampung)”. Dalam penelitian ini, menjelaskan bahwa ada dua faktor yang tidak terpenuhi oleh bantuan sosial PKH di kelurahan ketapang kuala yakni indikator masukan proses yang disebabkan oleh ketidaktepatan penentuan penerima bantuan oleh pihak pengelola yang menyebabkan kurang efektifnya PKH di kelurahan ketapang kuala dalam menanggulangi kemiskinan karena masih banyaknya penduduk miskin yang tidak tercover oleh kebijakan PKH. Dari segi kesamaan yaitu metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif, dan menggunakan teknik wawancara, kemudian pada objek penelitian yaitu bantuan Sosial PKH serta menggunakan perspektif ekonomi islam.

Sedangkan yang menjadi perbedaan terletak pada judul penelitian yaitu efektivitas kebijakan PKH dan juga lokasi tempat penelitian.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Efektivitas

a. Teori dan Indikator Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu pengukuran atau tolak ukur berhasil atau tidaknya tujuan ataupun sasaran yang telah di tentukan sebelumnya. Efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna menunjang tujuan. Adapun teori Efektivitas menurut para Ahli yakni sebagai berikut:

1. Menurut Makmur (2015) dalam (Wulandari et al., 2020, p. 35), Efektivitas merupakan pengukuran ketepatan harapan, implementasi dan hasil yang akan dicapai, sedangkan kegiatan yang tidak efektif adalah kegiatan yang selalu mengalami ketimpangan antara harapan, implementasi dengan hasil yang ingin dicapai. Adapun indikator Efektivitas menurut Makmur 2015 adalah:

- 1) Ketepatan penentuan waktu
- 2) Ketepatan perhitungan
- 3) Ketepatan dalam pengukuran
- 4) Ketepatan dalam menentukan pilihan
- 5) Ketepatan berfikir
- 6) Ketepatan menentukan tujuan
- 7) Ketepatan dalam menentukan perintah

8) Ketepatan sasaran

2. Menurut Richard M. Steers (1997) dalam (Anjela, 2019, p. 22), mendefinisikan Efektivitas yakni tujuan akhir dari suatu organisasi dimana organisasi haruslah memiliki tujuan utama yang berjangka panjang. Adapun indikator untuk mengukur Efektivitas menurut Richard M. Steers adalah:

1) Pencapaian tujuan, yakni keseluruhan upaya dalam pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin. Beberapa factor dalam pencapaian tujuan yakni sasaran dan kurung waktu yang merupakan target kongkrit.

2) Integritasi, yaitu kemampuan suatu organisasi dalam mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus serta komunikasi dengan berbagai organisasi lainnya. Adaptasi, yaitu kemampuan suatu organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

3. Menurut Ni Wayan Budiani dalam (Prichatin, 2019, pp. 19–20), menegemukakan bahwa Efektivitas dari kegiatan atau program yang dilakukan harus dilihat berdasarkan kesesuaian antara realisasi dan tujuan suatu program yang dilaksanakan. Adapun indikator dalam mengukur Efektivitas menurut Ni Wayan Budiani adalah:

1) Ketepatan sasaran

- 2) Sosialisasi program
 - 3) Tujuan program
 - 4) Pemantauan
4. Menurut Sutrisno dalam (Rahmah Muin, 2020, pp. 131–132), mengemukakan bahwa Efektivitas dari suatu program ataupun kegiatan yang dilaksanakan dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan realisasi program. Menurut Sutrisno, untuk mengukur efektivitas suatu program yakni menggunakan 5 indikator sebagai berikut:
- 1) Pemahaman Program, merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pemahaman KPM/masyarakat tentang Program Keluarga Harapan. Pemahaman program terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kegiatan sosialisasi adalah kemampuan penyelenggara program saat mengkomunikasikan kegiatan sosialisasi yang dilakukan sehingga masyarakat khususnya keluarga penerima manfaat dapat dengan mudah memahami program yang disampaikan.
 - 2) Ketepatan Sasaran, merupakan faktor penting dalam proses implementasi program karena memberikan baseline untuk program-program yang telah dilaksanakan, sehingga kita dapat lebih mudah

mengetahui apakah program berhasil atau tidak. Tepatnya, PKH hanya diberikan kepada rumah tangga yang datanya berasal dari desa. PKH menyasar masyarakat miskin yang telah dinyatakan berhak menerima bantuan PKH.

- 3) Ketepatan waktu, mengingat bantuan sosial PKH diberikan setiap tiga bulan sekaligus kepada masing-masing penerima PKH maka Ketepatan waktu dalam pencairan bantuan PKH sangat dibutuhkan.
- 4) Tercapainya Tujuan, yakni merupakan capaian dari suatu target dan sasaran yang dilakukan menggunakan beberapa tahapan yang telah ditentukan, sehingga dapat memberikan arahan terkait target yang ingin diraih. Program Keluarga Harapan/PKH memiliki tujuan yakni meningkatkan pelayanan pendidikan bagi anak sekolah dan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi pra sejahtera (jangka panjang), serta membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin (jangka pendek).
- 5) Perubahan Nyata, yaitu merupakan suatu bentuk perubahan yang dirasakan oleh individu maupun kelompok terkait pelaksanaan kegiatan atau program yang telah dilakukan. Ada 2 dampak perubahan nyata yakni dapat berdampak positif maupun berdampak

negatif, tergantung dari proses pelaksanaan yang disetujui dan diterapkan oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan efisien berdasarkan ketentuan yang telah diterapkan.

5. Menurut Budiani dalam (Yuliani, 2020), mengemukakan bahwa untuk mengukur Keefektivitasan suatu program tepat dengan sasaran dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sebagai berikut yakni:

- 1) Ketepatan sasaran program
- 2) Sosialisasi program
- 3) Tujuan program, yakni ukuran sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang di tetapkan sebelumnya.
- 4) Pemantauan program

2.2.2. Program Keluarga Harapan

a. Konsep Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan dan kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup dalam

bidang pendidikan dan kesehatan (Utomo et al., 2014, p. 31). Adapun beberapa teori mengenai program keluarga harapan yakni sebagai berikut:

1. Menurut Penelitian (Hasan, 2017, p. 3) memaparkan bahwa Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut dengan PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Program sebagaimana dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai:

- program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat.

Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

2. Penelitian (Andika, 2021, p. 46) menerangkan bahwa Tujuan dari PKH ini adalah upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). Adapun tujuan utamanya yakni:

- 1) Untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan
 - 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
 - 3) Mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.
3. Penelitian (Sari, 2020, p. 29) mengemukakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) sebenarnya telah dilaksanakan di berbagai negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama Program yang bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah Conditional Cash Transfers (CCT), yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini "bukan" dimaksudkan sebagai kelanjutan Program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin
4. Penelitian (Suleman & Resnawaty, 2017, p. 88) memaparkan Program Keluarga Harapan merupakan program yang bentuknya adalah pemberian dana tunai pada masyarakat. Program ini bertujuan untuk:

- meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan.

Sebenarnya ini adalah bentuk pengentasan kemiskinan, namun model ini yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Dimana pemerintah memiliki peran yang besar dalam menyediakan santunan minimal agar masyarakat dapat mencapai kualitas hidup optimal.

5. Penelitian (Amelia, 2021, p. 17) mengemukakan bahwa program keluarga harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) serta rentan yang terdaftar dalam DTKS dan di tetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

b. Tujuan Program Keluarga Harapan

Adapun tujuan dari bantuan sosial PKH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 tahun 2018 tentang Program keluarga Harapan yakni pada pasal 2 adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan dan kesejahteraan sosial.
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

c. Sasaran program Keluarga Harapan

Sasaran PKH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 tahun 2018 tentang Program keluarga Harapan pada pasal 3 yakni peserta PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial), memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

d. Kewajiban dan Hak Peserta PKH

Penelitian (Saraswati, 2018, pp. 51–55) mengemukakan kewajiban peserta PKH yang harus dipenuhi, yakni komponen Kesehatan, Pendidikan, Lansia dan penyandang disabilitas, adapun penjabaran mengenai kewajiban peserta PKH adalah sebagai berikut:

1) Kesehatan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protocol pelayanan kesehatan seperti di bawah ini:

Anak usia 0-6 tahun:

- a. Anak usia 0-28 (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.
- b. Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, campak, hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- c. Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus. Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- d. Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Early Childhood education) apabila di lokasi / posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

Ibu hamil dan ibu nifas:

- a. Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.

- b. Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
 - c. Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI.
- 2) Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan yakni kehadiran di satuan pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dengan beberapacatatan seperti di bawah ini:

- a. Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
- b. Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun, anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/paket A atau SMP/MTs/SMLB/Paket A atau SMP/MTs terbuka)
- c. Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka Peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.

- d. Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaran fungsional di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) terdekat.
 - e. Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut pekerja anak (PA) atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada dinas tenaga kerja dan dinas pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Pengurangan Pekerja Anak.
 - f. Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut anak jalanan (AJ) dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Kesejahteraan Sosial Anak.
- 3) Lansia 70 tahun keatas
- a) Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia)
 - b) Mengikuti kegiatan sosial (*day care*)

- 4) Penyandang disabilitas berat
 - a) Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan
 - b) Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah (*home care*)

Bila persyaratan di atas kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok lansia dan penyandang disabilitas berat dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur dan memiliki hak-hak sebagai anggota, hak-hak peserta PKH adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program.
- 2) Mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
- 3) Terdaftar dan mendapatkan program program komplementaritas dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.
- 4) Bagi lansia diatas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

e. Program Keluarga Harapan Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Dalam islam, pemberian bantuan sosial agar terwujudnya kesejahteraan sosial haruslah berlandaskan pada keadilan, tanggung jawab, kebaikan serta jauh dari segala kezholiman dan arogansi. Adapun upaya pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakat dilihat dari sudut pandang nilai nilai dasar Ekonomi Islam yakni sebagai berikut:

1. Keadilan

Program keluarga harapan merupakan bantuan tunai bersyarat dan merupakan bentuk tanggung jawab dan amanah serta kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Maka, pemerintah harus adil dalam pemberian bantuan sosial dengan cara memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang benar benar layak (tepat sasaran). Sebagaimana Agama Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan dunia. Keadilan yakni menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, serta konsisten pada kebenaran. Sebagaimana Allah Swt. Berfirman dalam Qs. An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya: 90. *Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*

Dari ayat diatas, Allah Swt sangat menekankan kepada umatnya untuk berperilaku adil, termasuk adil dalam perlindungan sosial yang di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

2. Tanggung jawab

Setiap pelaku ekonomi tentunya tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar serta amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Begitupun pemerintah yang memiliki kekuasaan atas suatu wilayah yang ia pimpin. Maka, seorang pemimpin hendaklah memposisikan dirinya sebagai pelayan serta pengayom masyarakat. Tanggung jawab dalam pelaksanaan PKH yakni peran pendamping dalam melaksanakan tugasnya yakni memberikan pengarahan, pendampingan kepada KPM, dan mensosialisasikan

mengenai hak dan kewajiban PKH. Sebagaimana dalam Firman Allah Swt dalam Qs. Al-Muddatsir ayat 38 sebagai berikut:

﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۗ ﴿٣٨﴾ ۝﴾

Terjemahnya: 38) *Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan (Qur'an kemenag RI, 2019).*

Maksud dari ayat diatas, seorang pemimpin haruslah mampu bersikap amanah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat karena apa yang diamanahkan kepada seseorang/pemimpin akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.

3. Takaful (Jaminan Sosial)

Jaminan sosial dalam Islam yaitu merupakan Huquq Allah atau kewajiban yang telah disyariatkan oleh Allah kepada orang yang memiliki kelebihan harta, untuk menafkahkan hartanya kepada mereka yang kurang mampu. Sebagaimana Allah Swt menjelaskan dalam Firmannya Qs. An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

﴿ ۙ۝۹ وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١﴾ ۝﴾

Terjemahnya: 9) *Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati)*

meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan bicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya) (Qur'an kemenag RI, 2019).

Jaminan sosial yang di berikan oleh pemerintah diharapkan dapat menyeluruh demi terciptanya kesejahteraan serta mendorong hubungan baik antar individu, masyarakat dan pemerintah. Jaminan sosial diharapkan dapat menghilangkan jarak pemisah antara kaya dan miskin sehingga adanya perlindungan sosial, masyarakat miskin mampu memenuhi kehidupannya dengan lebih layak serta mempererat hubungan sesama muslim. Sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat haruslah tepat sasaran dengan melihat orang yang benar benar layak untuk diberikan bantuan sosial. Karena Allah Swt. Menyukai hambanya yang tetap berusaha di atas usahanya sendiri (Sohari, 2017, p. 4). Rasulullah Saw. Bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori:

Terjemahnya: *“seseorang tidak memakan suatu makananpun yang lebih baik daripada dia memakan hasil usaha tangannya sendiri; dan sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s. selalu memakan hasil usaha tangannya sendiri” (HR. Al-Bukhori).*

Allah SWT juga sangat menekankan kepada manusia untuk tidak bergantung terhadap sesuatu dan selalu berusaha tanpa menunggu pemberian orang lain.

2.2.3. Kesejahteraan Masyarakat

a. Teori dan indikator Kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya) (Poerwadarminta, 1999). Adapun teori tentang Kesejahteraan Masyarakat menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Suharto dalam (Luthfi, 2019, pp. 83–84), mengemukakan bahwa kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia yakni mulai dari ekonomi budaya, hankamnas, iptek dll. Pemerintah memiliki kewajiban dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Adapun indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat menurut Suharto adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah dan pemerataan pendapatan, yakni pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha serta kondisi ekonomi lainnya.
 - 2) Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau, mudah dalam artian jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengakses pendidikan setinggi tingginya. Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka mengakses pendidikan.
 - 3) Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata, yakni masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh waktu dan jarak. Apabila masih banyak keluhan dari masyarakat tentang layanan kesehatan maka itu merupakan pertanda bahwa suatu negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh rakyatnya.
2. Menurut Bkkbn (Badan Kependudukan dan keluarga berencana nasional) 2017 dalam (BAPPENAS, 2015, pp. 10–13), mendefinisikan bahwa keluarga berdasarkan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS I), keluarga sejahtera II (KS II), keluarga sejahtera III (KS III), dan keluarga sejahtera III plus (KS III Plus). Adapun

indikator keluarga yang dapat dikategorikan sebagai keluarga sejahtera menurut Bkkbn yakni:

1) Tahapan Keluarga Prasejahtera (KPS)

Keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) sebagai keluarga sejahtera I.

2) Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I)

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat kebutuhan psikologis (psychological needs) keluarga.

Indikatornya yakni

- a) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- b) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang layak.
- d) Bila ada anggota keluarga sakit maka dibawa ke sarana kesehatan.
- e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB maka pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
- f) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

3) Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II)

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya (*Psychologica needs*), tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Adapun indikator keluarga sejahtera II (KS II) atau indikator kebutuhan psikologis (*Psychologica needs*) keluarga yaitu:

- a) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- b) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
- c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
- d) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.
- e) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
- f) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.

- g) Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.
 - h) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.
- 4) Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III)

Adapun tahapan dalam Keluarga Sejahtera III (KS III) yakni keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya (developmental needs). Pada keluarga sejahtera III, kebutuhan fisik, sosial psikologis dan pengembangan telah terpenuhi, adapun indikatornya yaitu:

- a) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- b) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
- c) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
- d) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
- e) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, radio, tv, internet.

5) Tahapan keluarga sejahtera III plus (KS III +)

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangannya dan akuntabilitas diri (self esteem) telah terpenuhi, adapun indikator keluarga sejahtera III plus yaitu:

- a) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial.
- b) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.

3. Menurut Todaro Stephen C. Smith dalam (Hasimi, 2020, p. 85), mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Adapun indikator kesejahteraan masyarakat menurut Todaro Stephen C. Smith adalah:

- 1) Tingkat kebutuhan dasar, yakni peningkatan kemampuan serta pemerataan kebutuhan dasar seperti makanan dan perumahan.
- 2) Tingkat kehidupan, yakni peningkatan tingkat kehidupan dan tingkat pendapatan serta pendidikan yang lebih baik.

- 3) Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dan individu bnagsa, yakni adanya pilihan pekerjaan yang lebih layak dan baik untuk masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
4. Menurut Chalid (2014) dalam (Asyiah Siregar & Ritonga, 2018, pp. 4–5) mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial yakni merupakan kondisi atau keadaan sejahtera baik fisik, mental dan sosial. Adapun indikator kesejahteraan menurut Chalid adalah:
 - 1) Kemapanan psikologis
 - 2) Kesehatan
 - 3) Pendidikan
 - 4) Kebudayaan
 - 5) Penggunaan waktu
 - 6) Pemerintahan yang baik
 - 7) Kekuatan komunitas
 - 8) Keanekaragaman ekologi dan kelenturan
 - 9) Standar hidup
5. Menurut Soetomo (2014) dalam (Wardani & Utami, 2020, pp. 38–39), mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat desa yakni merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur maupun komponen dimana masyarakat merasa tentram, aman, serta terdapat fasilitas umum yang diharapkan dapat menunjang perekonomian

masyarakat. Adapun indikator kesejahteraan masyarakat menurut Soetomo adalah:

- 1) Rasa aman
- 2) Fasilitas umum
- 3) Pendapatan
- 4) Akses informasi

Menurut Simarmata (1994) dalam (Wahyuningsih, 2020, p. 293), mengemukakan bahwa ekonomi kesejahteraan adalah dasar teoritis pembentukan kebijaksanaan ekonomi yang memusatkan perhatian terhadap rencana alternative, program institusi maupun perundang-undangan yang mencakup masalah-masalah sosial.

Menurut (Feldman, 2000, p. 1), mengemukakan bahwa ilmu ekonomi kesejahteraan merupakan salah satu cabang ekonomi yang normative yang mencakup bidang bahasan dari ilmu ekonomi kesejahteraan yakni pertanyaan apa yang buruk dan apa yang baik.

Menurut Midgley (1997) dalam (Huda, 2009, p. 71), mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi 3 (tiga) syarat utama. Pertama, ketika masalah sosial dapat di manej dengan baik. Kedua, ketika kebutuhan terpenuhi, ketiga, ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal.

b. Kesejahteran menurut perspektif Ekonomi Islam

Penelitian (Kholis, 2015, pp. 245–246) mengemukakan bahwa Sejahtera bermakna aman sentosa dan makmur; selamat atau terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Kesejahteraan dapat dimaknai dengan: hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman, kesenangan hidup, dan sebagainya; kemakmuran. Kesejahteraan Sosial atau social welfare adalah sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga-lembaga untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara antar individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhan mereka, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Penelitian (Wahab, 2020, p. 102) menjelaskan Seperti diketahui, bahwa sebelum Adam dan istrinya diperintahkan turun kebumi, mereka terlebih dahulu ditempatkan di surga. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu diwujudkan di bumi, serta kelak dihuninya secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan. Kesejahteraan surgawi ini dilukiskan antara lain dalam firman-Nya (QS, Thaha: 117-119) yang berbunyi:

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ
 الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾
 وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾

Terjemahnya: 117) Kemudian Kami berfirman, “Wahai Adam, sesungguhnya (Iblis) inilah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka, sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Kelak kamu akan menderita. 118) Sesungguhnya (ada jaminan) untukmu bahwa di sana engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. 119) Sesungguhnya di sana pun engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa terik matahari.” (Qur’an kemenag RI, 2019).

Menurut Imam Al Ghazali dalam (Purwana, 2014), mengemukakan bahwa kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan yakni terpeliharanya tujuan syara’ (*maqasyid al-shariah*). Untuk mencapai tujuan syara’ agar mencapai kemaslahatan, ada beberapa sumber/indikator kesejahteraan yakni:

- 1) Terpeliharanya agama
- 2) Terpeliharanta jiwa
- 3) Terpeliharanya akan
- 4) Terpeliharanya keturunan

- 5) Terpeliharanya harta, harta yakni sarana penting dalam mensejahterahkan umat namun juga dapat membuat bencana serta malapetaka bagi manusia.

Imam Al-Ghazali dalam (Sandi, 2018, pp. 39–40) mengatakan bahwa kunci dari pemeliharaan kelima tujuan dasar manusia meliputi:

- 1) Kebutuhan pokok (dharuriyat)
- 2) Kesenangan atau kenyamanan (hajiyat)
- 3) Kemewahan (tahsiniyat)

Imam Al-Ghazali membagi prioritas/indikator kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari yakni sebagai berikut:

- 1) Prioritas utama

Ad-dharuriyat adalah kebutuhan pokok yaitu kebutuhan sandang, papan atau perumahan dan semua kebutuhan pokok. Dharuriyat yakni tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia maupun akhirat. Karena mencakup terpeliharanya lima elemen dasar kehidupan.

- 2) Prioritas kedua

Al-hajiyat adalah kebutuhan yang wajar seperti penerangan dll. Al-hajiyat adalah merupakan kebutuhan sekunder untuk memudahkan kehidupan agar terhindar dari kesulitan. Namun, kebutuhan ini

tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi.

3) Prioritas ketiga

Tahsiniyat yakni kesempurnaan yang masih berfungsi sebagai kesenangan hidup dan kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang dapat menghadirkan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Syariat menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman didalamnya.

Adapun kunci dari pemeliharaan kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan prioritas pertama yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian dan perumahan. Imam AGhazali menyadari bahwa kebutuhan dasar demikian cenderung fleksibel mengikuti waktu dan tempat serta dapat mencakup bahkan kebutuhan sosio psikologis. Kelompok kebutuhan kedua terdiri dari semua kegiatan dan hal hal yang tidak vital bagi 5 pondasi tersebut. Sedangkan kelompok kebutuhan ketiga mencakup kegiatan-kegiatan dan hal hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja.

Demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, pemerintah sangat berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat baik kebutuhan dasar (primer), sekunder, tersier dan pelengkap selama tidak bertentangan dengan syariah sehingga dapat mendorong terciptanya masyarakat yang sejahtera.

2.3. Grand Teori

2.3.1. Efektivitas

Menurut Sutrisno dalam (Rahmah Muin, 2020, pp. 131–132), Efektivitas dari suatu program maupun kegiatan yang dilaksanakan dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan realisasi program. Adapun indikator Efektivitas menurut Sutrisno adalah:

- 1) Pemahaman Program
- 2) Ketepatan sasaran
- 3) Ketepatan waktu
- 4) Tercapainya tujuan
- 5) Perubahan nyata

2.3.2. Program Keluarga Harapan

Menurut Andika 2021 Program Keluarga Harapan adalah upaya mempercepat pencapaian target millennium Development Goals. Adapun tujuan PKH sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 tahun 2018 tentang Program keluarga Harapan yakni pada pasal 2 adalah:

- 1) Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan dan kesejahteraan sosial.
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Menurut perspektif ekonomi Islam, pemberian jaminan sosial dari pemerintah berupa bantuan sosial PKH haruslah berlandaskan pada nilai-nilai dasar ekonomi Islam yakni:

- 1) Keadilan
- 2) Tanggung jawab
- 3) Takaful (jaminan sosial)

2.3.3. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Bkkbn dalam (BAPPENAS, 2015, pp. 10–13), keluarga dengan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga yakni dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan yakni KPS, KS I, KS II, KS III, KS III Plus. Adapun indikator Kesejahteraan menurut Bkkbn yakni:

- 1) Perubahan konsumsi sehari-hari.
- 2) Meringankan biaya pendidikan anak sekolah.
- 3) Perubahan kondisi rumah menjadi lebih layak huni.
- 4) Perubahan dalam pembelian baju dalam satu tahun.
- 5) Mencapai batas minimal konsumsi daging ikan/telur.
- 6) Peningkatan pendapatan keluarga.

- 7) Mulai menyisihkan uang untuk menabung.
- 8) Kebersamaan di dalam keluarga lebih hangat.

Kesejahteraan menurut perspektif ekonomi islam yakni menggunakan teori/indikator Imam Al-Ghazali dalam (Sandi, 2018, pp. 39–40) yang mengatakan bahwa kunci dari pemeliharaan kelima tujuan dasar manusia meliputi:

- 1) Prioritas utama yakni Kebutuhan pokok (dhururiyat)
- 2) Prioritas kedua yakni Kesenangan atau kenyamanan (hajiyyat)
- 3) Prioritas ketiga yakni Kemewahan (tahsiniyat)

2.4. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran berisi mengenai konsep maupun teori yang menjadi patokan atau rujukan bagi peneliti dalam menjelaskan data yang dianalisis sehingga dapat mengarah pada tujuan yang ditetapkan sebelumnya (Kuswarno, 2006, p. 56). Sehingga, penulis mencoba untuk menguraikan mengenai efektivitas Pemberian Bantuan Sosial PKH dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa lalowatu ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

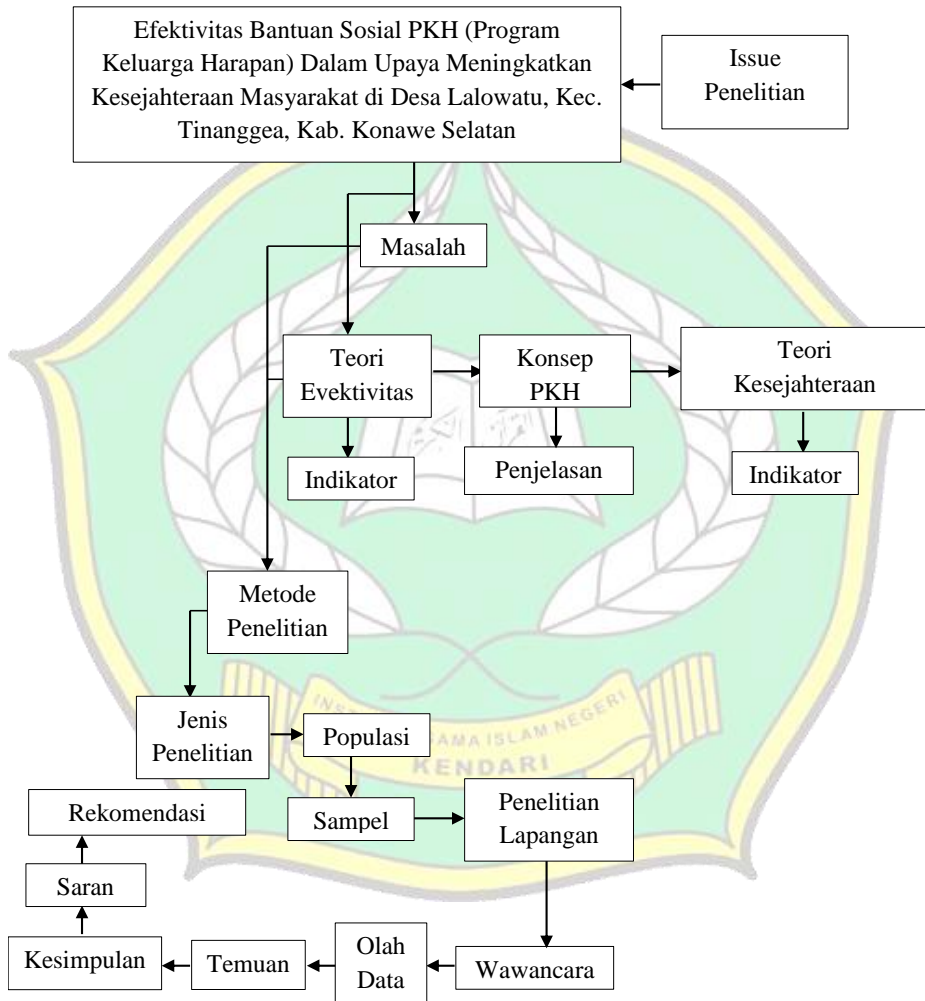
Penelitian ini dengan judul “Efektivitas Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lalowatu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Lalowatu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)” dengan mengangkat 2 rumusan masalah yaitu:

- 1) Bagaimana Efektivitas Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lalowatu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan?
- 2) Bagaimana Pandangan ekonomi Islam tentang Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lalowatu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan?

Diaspek lain, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Efektivitas, konsep Program Keluarga Harapan, teori Kesejahteraan. Teori Efektivitas menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sutrisno dengan menggunakan 5 indikator yakni pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata. Selanjutnya, konsep PKH menggunakan penelitian Andika 2021 yang memaparkan tujuan PKH sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 tahun 2018 tentang Program keluarga Harapan yakni pada pasal 2. Kemudian, teori Kesejahteraan menggunakan teori dari Badan Kependudukan dan keluarga berencana nasional (Bkkbn) dengan menggunakan indikator kesejahteraan seperti Perubahan konsumsi sehari-hari, Meringankan biaya pendidikan anak sekolah, Perubahan kondisi rumah menjadi lebih layak huni, Perubahan dalam pembelian baju dalam satu tahun, Mencapai batas minimal konsumsi daging ikan/telur, Peningkatan pendapatan keluarga, Mulai

menyisihkan uang untuk menabung, Kebersamaan di dalam keluarga lebih hangat.

Adapun gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Data diperoleh dilapangan 2022